



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 29 / Kpts / KP. 430 / B / 11 / 2020

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat komitmen, dan Bendaharawan yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

KESATU : Aparatur Sipil Negara yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pejabat Eselon I;
2. Pejabat Eselon II;
3. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

KETIGA : Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY  
NIP 196203221983031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN  
NOMOR 29/Kpts/KP.430/B/11/2020  
TENTANG  
PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja
1.	Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. NIP 196203221983031001	Pembina Utama Madya IV/d	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2.	Gunawan, S.P., M.Si. NIP 197407081998031002	Pembina TK.I IV/b	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/ Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3.	Erwin Noorwibowo, STP NIP 196911231998031003	Pembina TK.I IV/b	Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

4.	Ir. Rahmanto, M.Sc. NIP 196811061994031001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Irigasi Pertanian/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
5.	Ir. Indah Megahwati, M.P. NIP 196801151993032001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pembiayaan Pertanian/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembiayaan Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
6.	Muhammad Hatta S, STP, MM NIP 198106182000121003	Pembina TK.I IV/b	Direktur Pupuk dan Pestisida/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
7.	Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. NIP197502012002121001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Alat dan Mesin Pertanian/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
8.	Ony Wiryawan, ST, M.Sc NIP 197002102002121001	Pembina IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
9.	Arpin, S.P. NIP 196908212002121001	Penata III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Utama dan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
10.	Diana Nur Fatimah, S.P. NIP 198404042003122002	Penata III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri <i>Food Management in Selected River Basins</i> , Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Persiapan kegiatan PHLN Konservasi Lahan dan Air Mendukung Pengembangan Pertanian Terpadu di Lahan Kering	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

11.	Lukman Irwanto, S.E.	Penata TK.I III/d	Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
12.	Dr.Ir. Dyah Susilokarti, MP	Pembina TK.I IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian Aspek Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
13.	Farakka Sari, S.T.P., M.Sc. NIP 197704062005012001	Penata TK. I III/d	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri <i>Upland Development For Food Security</i>	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
14.	Drs. Sutrisno Nugroho, M.M. NIP. 196306191988031001	Pembina TK. I IV/b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
15.	Puguh Hari Prabowo, S.E. NIP 198211182006041008	Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
16.	Leli Eka Rismawati, S.E. NIP 198401102008012009	Penata TK.I III/d	Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
17.	Gunadi, S.E. NIP 196912082003121001	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

18.	Hendri Y. Rahman, S.T.P. NIP 197012072006041013	Penata III/c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
19.	Djati Kuntjoro, S.Komp NIP 197103221999031001	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
20.	Asep Trisdianto, S.T. NIP 19750904200212001	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
21.	Fani Febriano, S.T. NIP 197702052003121002	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
22.	German Silaen, SE, MM NIP 196509121997031001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

23.	Muhammad Ikhwan, S.E., M.M. NIP 197904072002121001	Pembina TK.I IV/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Pembiayaan Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
24.	Risda Sinaga, S.P., M.Si NIP 196906011998032001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
25.	Erna Riyanti Wardhani, S.Pt. NIP 197410221999032001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
26.	Yanti Ermawati, S.P., M.Si NIP 197201081998032001	Pembina TK.I IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk	Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
27.	Nunuk Hermin Yanuwati, S.sos. NIP 197301301999032001	Penata TK.I III/d	Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk	Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001